



Realisasi Capaian dan Catatan Hulu Migas Nasional



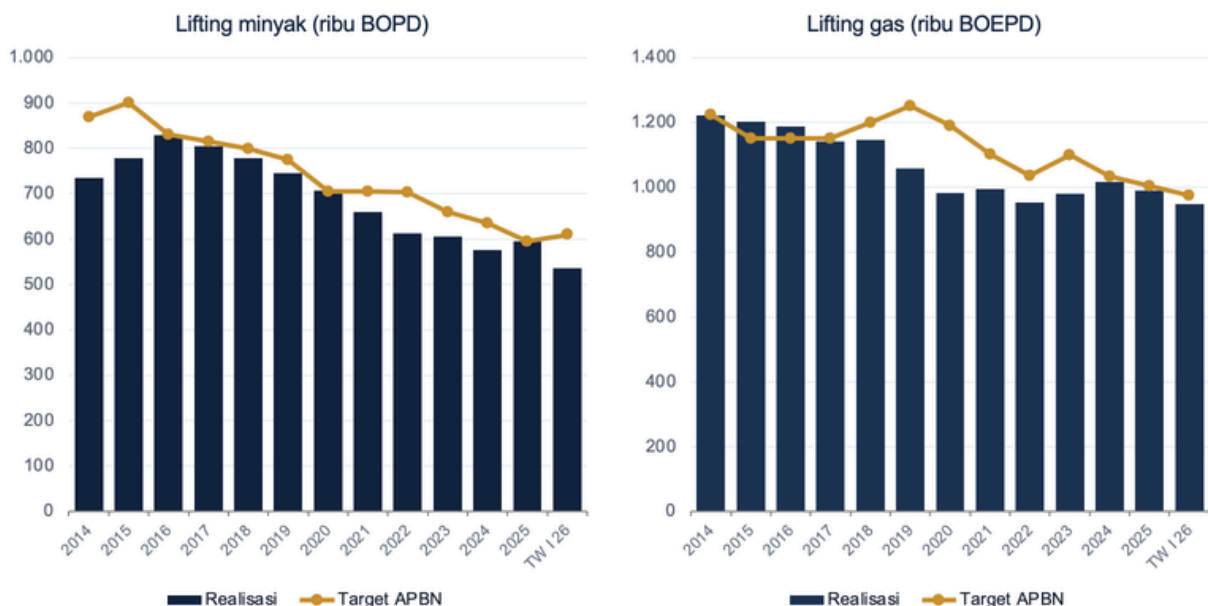
Realisasi Capaian dan Catatan Hulu Migas Nasional

Eskalasi konflik Timur Tengah beserta potensi risikonya kembali menegaskan mengenai peran penting industri hulu migas nasional. Risiko konflik Timur Tengah tidak hanya terkait dampak fluktuasi harga minyak dan gas, tetapi menyentuh langsung aspek kerentanan rantai pasok dan arsitektur neraca energi Indonesia. Peningkatan kinerja hulu migas nasional memiliki peran penting sebagai *natural hedging* terhadap postur fiskal APBN, pilar ketahanan energi nasional di tengah volatilitas geopolitik, dan stabilitas makroekonomi dan pengendalian defisit transaksi berjalan (CAD).

Catatan dan pandangan ReforMiner terhadap realisasi capaian dan catatan hulu migas nasional adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Indonesia sepanjang tahun 2026 menunjukkan ketahanan operasional yang baik terutama dalam menahan laju penurunan alamiah pada lapangan-lapangan tua (*mature fields*). Meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan dinamika industri, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu migas sudah mulai berproses dan masuk pada tahap lebih lanjut.
2. Meskipun menghadapi *decline rate* alamiah sebesar 15–20% per tahun pada sejumlah lapangan tua, hulu migas nasional tercatat mampu mempertahankan profil produksi pada tingkat yang stabil. Realisasi lifting minyak nasional hingga pertengahan dan kuartal III 2026 tercatat di kisaran 576,2 hingga 578,2 MBOPD. Salur gas nasional pada periode yang sama sebesar 5.208 MMSCFD (mencapai 94,5% dari target APBN).

TARGET APBN VS REALISASI LIFTING MIGAS, 2014–TW I 2026



Sumber: KESDM dan Kemenkeu; diolah ReforMiner. Lifting gas dalam ribu barel setara minyak per hari.

3. Capaian profil produksi yang relatif stabil tersebut diantaranya merupakan hasil dari efisiensi teknologi pengeboran *batch drilling* dan *dual completion* di PHR Zona 4 (Sumur GNK-114 dengan produksi awal 5.605 BOPD), keandalan Blok Mahato (*Texcal Energy*), serta kontribusi terpadu dari optimasi sumur masyarakat (legalisasi BKU) dan pengurangan *dead stock*.
4. Tahun 2026 menjadi titik balik (*pivotal year*) di mana proyek-proyek hulu migas besar yang sempat tertunda secara resmi berproses dari fase perencanaan menuju fase eksekusi fisik di lapangan. Beberapa proyek yang terpantau berproses diantaranya: (1) proyek LNG Abadi Blok Masela (Inpex, Pertamina, Petronas). Seremoni *groundbreaking* dan konstruksi awal Proyek LNG Abadi Masela resmi dimulai pada 16 Juli 2026, (2) proyek Northern Hub Kalimantan Timur & IDD (Eni). Integrasi proyek *Indonesia Deepwater Development* (IDD - Lapangan Gendalo & Gandang) disetujui melalui revisi *Plan of Development* (PoD) terintegrasi, (3) pengembangan Gas Hub South Andaman (Mubadala Energy & Harbour Energy). SKK Migas merampungkan persetujuan PoD guna menyiapkan infrastruktur penyaluran gas ke kawasan industri Sumatra Utara dan Kilang Arun, dan (4) fasilitas CCUS Pertama di Tangguh UCC (BP).
5. Meskipun capaian *lifting* dan progres sejumlah PSN hulu migas nasional menunjukkan tren positif, terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menghambat kesinambungan pencapaian target produksi migas dalam jangka panjang. Fasilitas produksi berumur & *unplanned shutdown* berulang menjadi kendala utama dalam mencapai keberlanjutan produksi migas nasional dalam jangka panjang. Sejumlah permasalahan yang ditemukan di lapangan membuktikan bahwa program pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) pada fasilitas utama masih menjadi titik lemah.
6. Ketergantungan produksi/*lifting* migas yang terlalu besar pada produsen utama menjadi masalah tersendiri. Profil produksi migas nasional relatif sensitif terhadap kendala yang dialami oleh produsen utama. Sebagai contoh, produksi migas nasional sudah sangat terganggu oleh masalah seperti kenaikan *Water Cut* dan GOR di ExxonMobil Cepu Ltd. (EMCL) dan gangguan sistem kelistrikan di Pertamina Hulu Rokan.
7. Kinerja hulu migas nasional masih menghadapi permasalahan yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti keterlambatan perizinan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH/PPKH), kendala status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/LSD), serta tumpang tindih lahan operasional dengan sektor lain yang menyebabkan terjadinya *bottleneck* investasi.



8. Mencermati permasalahan hulu migas nasional tersebut diperlukan dukungan kebijakan & penataan regulasi (*regulatory support*). Untuk memberikan kepastian hukum, menjamin *sanctity of contract*, memberikan kepastian badan usaha, dan menawarkan skema investasi yang kompetitif, penyelesaian dan pengesahan revisi UU Migas penting untuk segera dilakukan.
9. Pada lingkup yang lebih teknis, penerbitan Inpres untuk menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) perizinan terpadu maksimal 30 hari untuk penerbitan AMDAL/UKL-UPL di Kementerian LHK, IPPKH/PPKH di Kemenhut, serta pelepasan tumpang tindih lahan LP2B/LSD di Kementerian ATR/BPN juga penting untuk dilakukan.
10. Keberlanjutan produksi migas nasional memerlukan dukungan insentif fiskal dan investasi. Pemerintah perlu memberikan insentif khusus untuk lapangan mature & berisiko tinggi seperti memberikan fleksibilitas skema bagi hasil (*split*), *tax allowance*, serta fasilitas depresiasi dipercepat untuk KKKS yang mengelola lapangan tua dengan *water cut tinggi* agar keekonomian pengurusan minyak tahap lanjut (EOR) tetap terjaga. Untuk saat ini relatif tidak terdapat pilihan, jika insentif tidak diberikan produksi tidak dapat dipertahankan.

TIGA KENDALA UTAMA



01

KEANDALAN FASILITAS

Fasilitas produksi berumur dan unplanned shutdown berulang. Preventive maintenance masih menjadi titik lemah.



02

KONSENTRASI PRODUKSI

Gangguan pada produsen utama berdampak signifikan pada lifting. Contoh: water cut/GOR di Cepu dan kelistrikan di PHR.



03

HAMBATAN PERIZINAN

AMDAL/UKL-UPL, PPKH, status LP2B/LSD, serta tumpang tindih lahan masih menghambat pelaksanaan investasi.

PRIORITAS DUKUNGAN KEBIJAKAN



REGULASI MIGAS

Penyelesaian UU Migas untuk memperkuat kepastian hukum, kontrak dan badan usaha.



SLA PERIZINAN

Usulan Inpres: SLA maksimal 30 hari bagi perizinan lintas kementerian.



INSENTIF MATURE FIELD

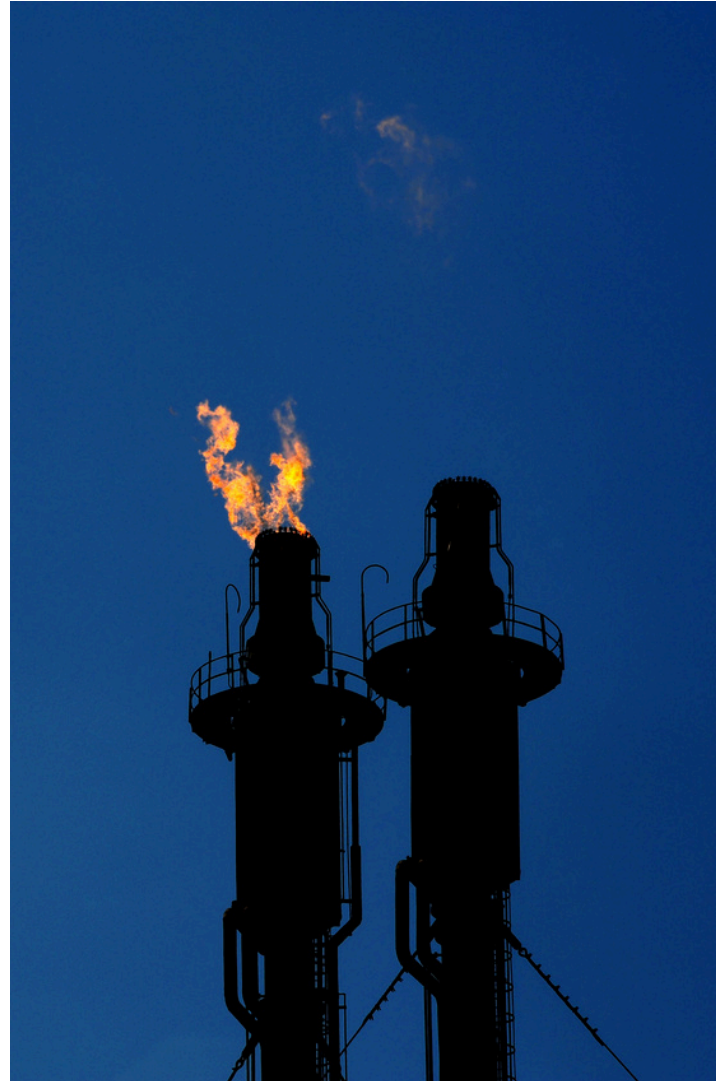
Fleksibilitas split, tax allowance, dan depresiasi dipercepat untuk mature fields/EOR.



Stabilitas lifting memerlukan keandalan operasi, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan keekonomian investasi mature field.

Profil ReforMiner Institute

ReforMiner Institute adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan yang menempatkan diri sebagai mitra strategis dan konstruktif bagi para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan. Fokus kajian yang sekaligus menjadi *core competency* ReforMiner Institute adalah **Analisis Kebijakan, Proyeksi dan Pemodelan Ekonomi Energi**.



Alamat:

World Trade Centre (WTC) 5 Lt.3A,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31 Jakarta
12920

Email:

info@reforminer.com